BADAN POM RI

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN II TAHUN 2018

BADAN POM RI

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN II TAHUN 2018

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 dituangkan dalam "Kinerja BPOM Dalam Angka". Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan *full spectrum* yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018, beberapa kasus penting terkait pengawasan Obat dan Makanan telah ditemukan dan berhasil diungkap oleh BPOM dan menjadi perhatian besar di masyarakat. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin kompleksnya permasalahan dan dinamika perubahan lingkungan strategis, maka pengawasan Obat dan Makanan perlu diperkuat. Untuk itu, beberapa langkah strategis dilakukan BPOM dalam rangka transformasi menuju "BPOM baru".

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan II Tahun 2018. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, Agustus 2018
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

daftar isi

SAMBUTAN KEPALA BPOM R.I ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
HIGHLIGHT **1**
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN **5**
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Produk Obat dan Makanan .. 6
II. Hasil Investigasi Awal dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan 10
III. Standardisasi 12
IV. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat 14
V. Penayangan Data dan Informasi Strategis Pada BPOM *Command Center* 18
VI. Perkuatan Peraturan Perundang-undangan Pengawasan Obat dan Makanan .. 19
VII. Layanan Bantuan Hukum (*Legal Management*) 20
VIII. Kerjasama Internasional 21
IX. Pengelolaan Anggaran 22
X. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM 23
PENUTUP **23**
LAMPIRAN **24**

daftar gambar

Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2018 6
Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan s.d. Triwulan II Tahun 2018..... 6
Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2018 7
Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2018 7
Gambar 5. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2018 8
Gambar 6. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2018 8
Gambar 7. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2018... 9
Gambar 8. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2018 . 9
Gambar 9. Profil Laporan Efek Samping 10
Gambar 10. Proporsi Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan POM Pusat dan Balai s.d. Triwulan II Tahun 2018 22
Gambar 11. Proporsi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja s.d Triwulan II Tahun 2018 22

BADAN POM RI

HIGHLIGHT

s.d. TRIWULAN II TAHUN 2018

Pelaku Usaha UMKM Jamu: "Kami Harus Taat Aturan"

Sukoharjo / Minggu (01/04/2018)

Kepala BPOM terus mendorong jajarannya untuk melakukan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM khususnya jamu karena kedepan sektor ini akan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian. Penny K. Lukito melakukan kunjungan kerja di Sukoharjo ke 2 UMKM jamu yang telah dibina oleh BPOM melalui Balai Besar POM di Semarang sehingga berhasil menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara bertahap yaitu CV. Al Ghuroba dan UD. Rachmasari.

BPOM Perlu Terobosan Strategi Guna Tingkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan

Bogor / Selasa (03/04/2018)

BPOM meyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) selama 4 hari yang diikuti oleh seluruh perwakilan dari Balai Besar POM/Balai POM dan semua unit kerja di BPOM Pusat, dengan mengusung tema "Arah Kebijakan BPOM tahun 2019".

Penny K. Lukito lebih jauh menyampaikan bahwa arah Kebijakan BPOM Tahun 2019 harus didukung dengan berbagai upaya terobosan melalui program prioritas.

Kosmetik Ilegal Senilai 15 M di Tambora, Temuan Terbesar BPOM Sampai Dengan Pertengahan Tahun 2018

Jakarta / Jum'at (11/05/2018)

Petugas BPOM RI dengan dukungan Bareskrim Mabes POLRI menggerebek sebuah bangunan di Jl. Pengukiran Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dari TKP, petugas menemukan 21 item (39.389 pieces) produk jadi kosmetik ilegal. Petugas juga temukan 7 jenis alat produksi sederhana, 3 jenis bahan baku *cream* kosmetik, serta berbagai bahan kemasan yang diduga digunakan dalam proses produksi kosmetik ilegal tersebut. Total nilai keekonomian temuan ini diperkirakan mencapai 15 miliar rupiah.

Peringati Hari Kebangkitan Nasional dengan Lantik 9 Orang Pejabat di Lingkungan POM RI

Jakarta / Senin (21/05/2018)

Bersamaan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 110, Kepala BPOM kembali melantik 9 orang pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan BPOM. Hadirnya Petinggi BAPPENAS pada jajaran struktural terkait dengan sinkronisasi perencanaan antara BPOM RI dan Balai Besar/Balai POM, sekaligus sebagai koordinasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah melalui sinkronisasi perencanaan dalam rancangan RKP dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 dengan melibatkan lintas sektor dan pemangku kepentingan.

Kepala BPOM: Visi, Arah dan Gerak Kita Harus Sama

Pontianak / Senin (28/05/2018)

Kepala BPOM Penny K. Lukito melakukan kunjungan kerja dan pembinaan kepada jajaran Balai Besar POM (BBPOM) di Pontianak, didampingi oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Deputi III) Suratmono, Deputi Bidang Penindakan (Deputi IV) Hendri Siswadi, Kepala Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan Rafail Walangitan dan Direktur Pengamanan, Brigjen. Pol Rusli Hedyaman.

Dalam kunjungannya beliau mengatakan bahwa dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah NKRI, seluruh jajaran BPOM harus memiliki visi, arah dan gerakan yang sama.

Seru Bahas #panganamanlebaran Bersama Blogger dan Media

Jakarta / Selasa (05/06/2018)

Peningkatan permintaan produk pangan saat Ramadhan dan Idul Fitri memerlukan kegiatan intensifikasi pengawasan untuk mengantisipasi produk makanan yang tidak sesuai ketentuan.

Oleh karena itu BPOM bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) mengadakan workshop #panganamanlebaran untuk komunitas *blogger* dan media.

Kunjungan Expert WHO dalam rangka Previsit WHO NRA Benchmarking

Jakarta / Kamis (07/06/2018)

BPOM sebagai regulator mempunyai peran penting dalam menyusun kebijakan nasional di bidang pengawasan obat, termasuk vaksin. Sejumlah besar vaksin diekspor untuk keperluan pra-kualifikasi *World Health Organization* (WHO) ke *Low Income Countries* (LIC) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Untuk memperkuat sistem pengawasan oleh BPOM, WHO melakukan *National Regulatory Authority* (NRA) *Benchmarking* pada tanggal 9-13 Juli 2018. Dalam rangka membantu BPOM untuk memahami dan menyiapkan WHO NRA *Benchmarking* tersebut, tim WHO melakukan *pre-visit* ke BPOM untuk memberikan *technical assistance* pada tanggal 7 – 8 Juni 2018.

BPOM Raih WTP untuk ke-4 kalinya

Jakarta / Jum'at (08/06/2018)

Bertempat di Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kepala BPOM Penny K. Lukito menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BPOM tahun anggaran (TA) 2017. LHP ini langsung diberikan oleh Anggota VI BPK, H. Harry Azhar Azis.

Terhadap hasil pemeriksaan LHP TA 2017 BPOM, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Badan POM telah mendapatkan opini WTP secara berturut-turut sejak tahun 2014 s.d 2016.

BADAN POM RI

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

s.d. TRIWULAN II TAHUN 2018

I Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Obat dan Makanan

Pengawasan *pre-market*

Sebelum obat diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Republik Indonesia harus diregistrasi di BPOM untuk dievaluasi terlebih dahulu terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi pada penandaannya/label.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2018, telah diterbitkan **53.992** keputusan dan **52.177** persetujuan izin edar dari **67.851** berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.

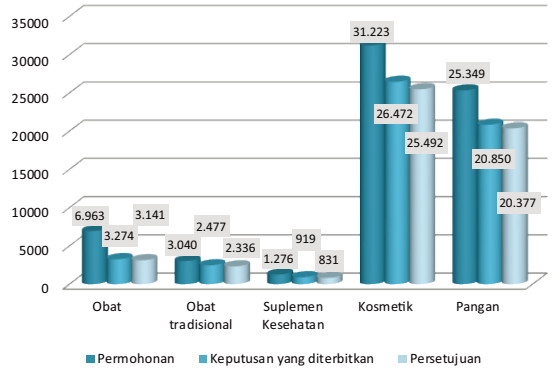

Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2018

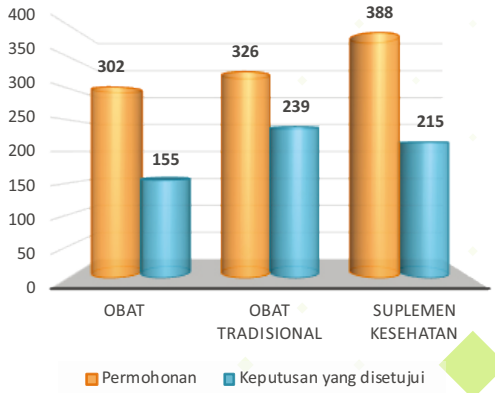

Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan s.d. Triwulan II Tahun 2018

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, BPOM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan ijin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. **Sampai dengan Triwulan II tahun 2018, dari 1.016 rancangan iklan, telah disetujui 609 iklan.**

Pengawasan *post-market*

Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

1 Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

BPOM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

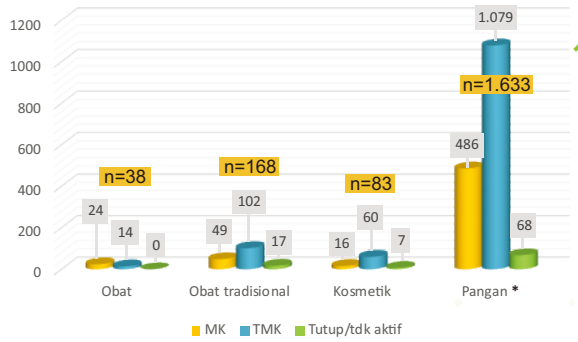

Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II tahun 2018

Sampai dengan Triwulan II tahun 2018 telah diperiksa sebanyak **1.922** sarana dengan **1.255** sarana adalah TMK.

* Sumbangan terbesar **TMK** pada sarana produksi pangan adalah **IRTP** (773 Sarana)

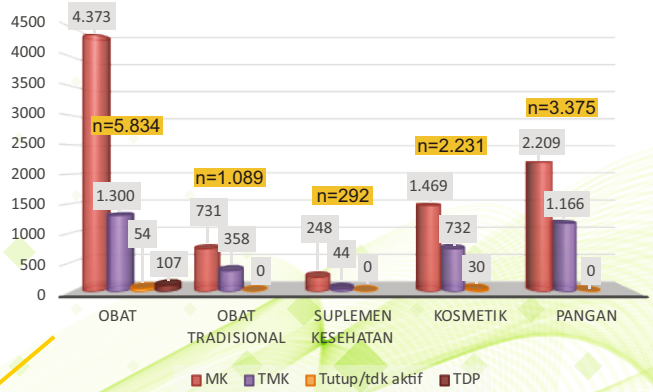

Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II tahun 2018

Sampai dengan Triwulan II tahun 2018 telah diperiksa **12.906** sarana distribusi obat dan makanan dengan **4.028** sarana adalah TMK.

Ket:
MK = Memenuhi Ketentuan
TMK = Tidak Memenuhi Ketentuan
TDP = Tidak dapat diperiksa

2 Sampling dan Pengujian Laboratorium

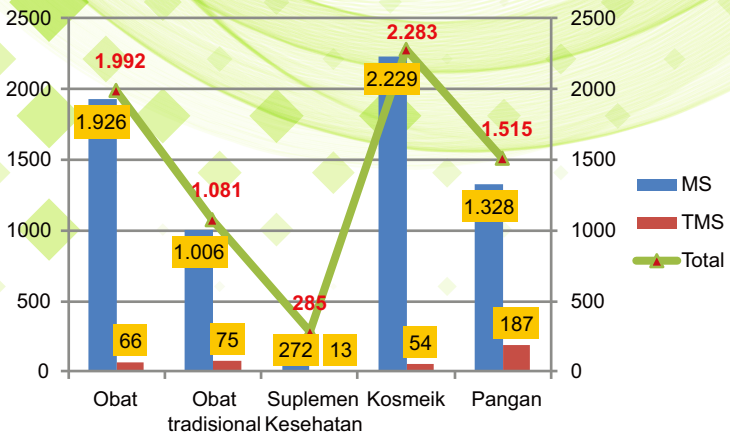

Gambar 5. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan s.d. Triwulan II tahun 2018

Sampai dengan **Triwulan II tahun 2018** telah dilakukan pengujian Obat dan Makanan terhadap **7.156 sampel**, dimana **6.761 (94,48%) sampel MS**.

Ket:
MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat

3 Sertifikasi

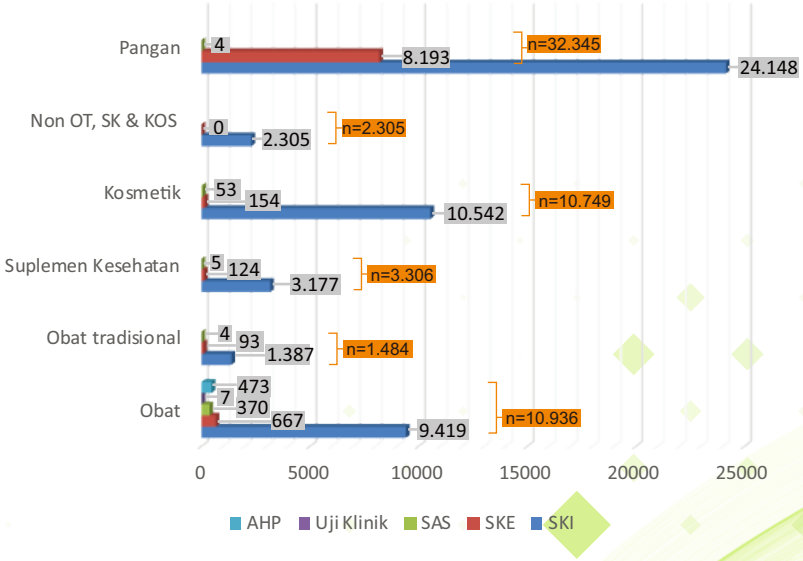

Gambar 6. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II tahun 2018

Dalam rangka mendorong ekspor dan Impor pengawasan Produk dan Bahan Baku yang masuk ke wilayah Indonesia, BPOM mengeluarkan Surat Keterangan Ekspor (SKE) dan Surat Keterangan Impor (SKI), SAS (*Special Access Scheme*) dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan **Triwulan II tahun 2018** telah diterbitkan **4.231 SKE, 50.978 SKI**, **436 SAS**, **7 Uji Klinik**, dan **473 AHP** Obat dan Makanan.

4 Pengawasan Iklan

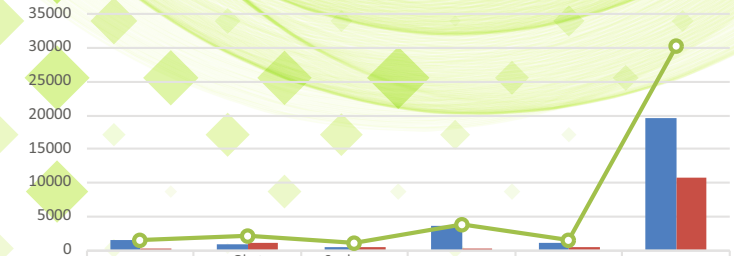

	Obat	Obat tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Rokok
MK	1437	931	537	3552	1168	19538
TMK	76	1157	517	215	380	10792
Total	1513	2088	1054	3767	1548	30330

Gambar 7. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan II tahun 2018

Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang keliru tentang produk Obat dan Makanan, BPOM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan *leaflet*/brosur. **Sampai dengan Triwulan II tahun 2018, dari 41.654 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 28.425 iklan memenuhi ketentuan.**

5 Pengawasan Label

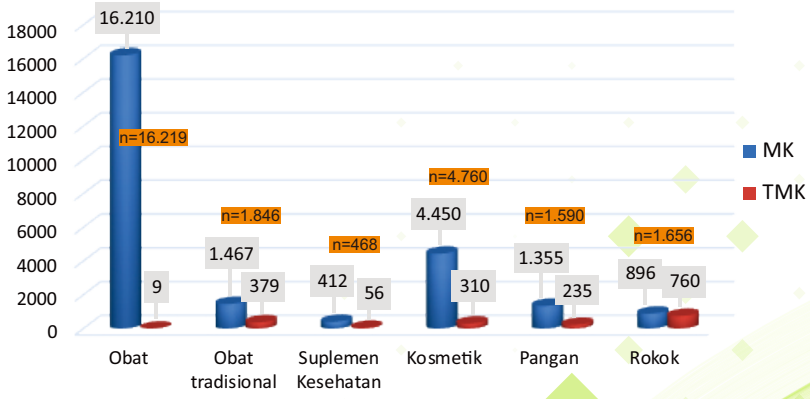

Gambar 8. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan II tahun 2018

BPOM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui BPOM agar tidak memberikan informasi salah dan menyesatkan masyarakat. **Sampai dengan Triwulan II tahun 2018, dari 28.323 label Obat dan Makanan yang diawasi, 26.051 (91,98%) label memenuhi ketentuan.**

6 Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping dan Kosmetik (MESKOS)

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik sangat luas oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, BPOM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia :

- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmokologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

	Jumlah Laporan
Obat	164.119
Obat Tradisional	15
Suplemen Kesehatan	17
Kosmetik	97

Gambar 9. Profil Laporan Efek Samping

II Hasil Investigasi Awal dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Sampai dengan Triwulan II pada tahun 2018, PPNS BPOM telah menindaklanjuti perkara sebanyak 113 perkara. Dari 113 perkara tersebut, 51 perkara masih dalam tahap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP); 1 perkara telah dinyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3); 21 perkara pada tahap 1; 17 perkara dalam tahap P–18/P–19; 13 perkara, berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) (P–21), 9 perkara sudah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU (Tahap 2) dan 1 perkara telah mendapatkan putusan pengadilan.

1 Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM RI dan Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Mabes POLRI menggerebek sebuah bangunan di Jl. Pengukiran Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Jumat, 11 Mei 2018. Bangunan tertutup 3 lantai tersebut disinyalir menjadi tempat produksi kosmetik ilegal termasuk palsu dan diduga kuat mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik, yaitu merkuri dan/atau hidrokinon.

Dari Tempat Kejadian Perkara (TKP), petugas menemukan 21 item (39.389 *pieces*) produk jadi kosmetik ilegal. Beberapa di antaranya merupakan produk yang banyak ditemukan di pasaran, antara lain *Cream Natural* 99, *Cream* Temulawak, *Kelly Pearl Cream*, Dokter *White*, SP *Whitening and Anti Acne*, *question Quine Pearl Cream*, Citra *Day Cream*, Citra *Night Cream*, serta La Widya Temulawak.

Petugas juga temukan 7 jenis alat produksi sederhana, 3 jenis bahan baku *cream* kosmetik, serta berbagai bahan kemasan yang diduga digunakan dalam proses produksi kosmetik ilegal tersebut. Sebagian besar merupakan kosmetik yang biasa digunakan untuk perawatan wajah. Total nilai keekonomian temuan kali ini diperkirakan mencapai 15 miliar rupiah.

Kosmetik ilegal ini dari kemasan luarnya sangat rapi. Beberapa terlihat seolah merupakan produk impor, namun sebenarnya adalah produk ilegal. Proses produksinya juga sangat tidak manusiawi karena menggunakan bahan–bahan yang tidak memenuhi standar Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB). Lokasi produksinya pun tidak terjamin higiene dan sanitasinya.

Produk kosmetik ilegal tersebut besar kemungkinan akan disebarkan ke sarana distribusi kosmetik ataupun klinik–klinik kecantikan di berbagai wilayah. Terhadap temuan ini, pelaku dikenai sanksi pidana terkait Undang–Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Selain itu, juga melanggar Pasal 62 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2 Operasi Opson VII Tahun 2018

Operasi Opson VII di Indonesia merupakan operasi pemberantasan produk pangan segar dan olahan yang tidak memiliki izin edar dan atau tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan yang diedarkan secara konvensional maupun secara online melalui internet.

Hasil penindakan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM terhadap 202 sarana yang diduga melakukan kegiatan produksi dan/atau peredaran produk pangan yang menjadi target Operasi Opson VII dengan total temuan 1.537 *item*, 1.493.600 *pieces* dengan nilai ekonomi Rp21.754.728.471. Sedangkan Penindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap 215 paket yang menjadi target operasi ditemukan 1.027 pieces produk dengan total temuan Rp14.188.928.719. Total nilai keekonomian sebesar **Rp35.943.657.190** (Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh rupiah).

III Standardisasi

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di Bidang Obat dan Makanan.

Obat

Telah disusun 10 standar obat, dimana 2 standar progresnya mencapai lebih dari 50% yaitu Kajian regulasi *QR Code* (100%) dan Draf Penyusunan regulasi Prosedur Operasional Penerapan Pedoman (POPP) (85%).

Obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan

Telah disusun 10 standar obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, dimana 8 standar progresnya mencapai lebih dari 50% yaitu

1. Revisi Rancangan Peraturan Kepala Badan POM No. 1384 tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Tradisional (60%)
2. Revisi Perka BPOM Nomor 12 tahun 2014 tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional (70%)
3. Revisi Rancangan Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Promosi dan Periklanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (60%)
4. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor.HK.00.05.41.1381 tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan (60%)
5. Rancangan Revisi Perka BPOM Nomor HK.00.05.23.3644 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Kesehatan (50%)
6. Pedoman Klaim Obat Suplemen Kesehatan (50%)
7. Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (50%)
8. Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika (100 %)

Telah disusun 20 kajian obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, yaitu

1. Kajian *Coscinium fenestratum* dan *Evolvulus alsinoides* (100%)
2. Kajian bahan baku sisik dan kulit ikan Toman (*Channa micropeltes*) sebagai kategori produk obat tradisional (100%)

3. Kajian kategori produk dengan bahan baku Bawang Hitam (100%)
4. Kajian Persyaratan Kadar Sineol dalam Produk Minyak Kayu Putih (100%)
5. Kajian Bahan Baku Dilarang dalam Produk "Gurukirpa" (*Painquit Oil* dan *Diabosoft Cream*) (100%)
6. Kajian Tindak lanjut permohonan Naik Banding Produk *Nutrimax Pasangin* (100%)
7. Kajian *Natrium sulfat* sebagai Bahan Aktif dalam Produk Obat Tradisional (100%)
8. Kajian di bidang suplemen kesehatan *N-acetylsystein* (100%)
9. Kajian di bidang suplemen kesehatan Kalsium Laktat (kadar air) (100%)
10. Kajian Kategori Produk Mengandung *Quail Egg Powder* (100%)
11. Kajian Metode Identifikasi *Strain Probiotik* (100%)
12. Kajian Regulasi Batas Maksimum Penggunaan *Potasium Sorbat* (100%)
13. Kajian Keamanan dan Kemanfaatan *Choline-Stabilised Orthosilicic Acid* sebagai Suplemen Kesehatan (100%)
14. Kajian tentang *Lemongrass Oil* (*Cymbopogon Flexuosus* dan *Cymbopogon Citratus*) sebagai Bahan Antiseptik Dalam Sabun Mandi Kajian tentang *Timiron Liquid Silver* (100%)
15. Kajian tentang *Timiron Liquid Silver* (100%)
16. Kajian tentang *Benzene* sebagai Cemaran dalam Kosmetika (100%)
17. Kajian tentang *Kloroform* sebagai Cemaran dalam Kosmetika (100%)
18. Kajian tentang *Dibutyl phtalate* sebagai Cemaran dalam Kosmetika (100%)
19. Kajian tentang *Climbazole* 1% sebagai Anti *Dandruff* pada *Shampoo* (100%)
20. Kajian tentang *Ethoxydiglycol* (100%)

Pangan

Telah disusun 18 standar pangan, dimana 6 standar progresnya mencapai lebih dari 50% yaitu :

1. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pangan untuk Kebutuhan Gizi Khusus – PKMK (70%)
2. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pangan untuk Kebutuhan Gizi Khusus – PDK (70%)
3. Rancangan Peraturan BPOM tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan (100%)
4. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Tambahan Pangan (70%)
5. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM tentang Informasi Niai Gizi (70%)
6. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM tentang Kategori Pangan 01.0 Produk–Produk Susu dan Analognya, kecuali yang termasuk Kategori Pangan 02.0 (78%)

IV Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

BPOM menerapkan sistem pengawasan tiga lapis, yaitu produsen, pemerintah dan masyarakat. Sebagai salah satu pilar dalam pengawasan obat dan makanan, masyarakat harus terus diedukasi dan diberi informasi yang benar tentang keamanan obat dan makanan agar dapat melindungi dirinya sendiri dari risiko kesehatan yang ditimbulkan akibat obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat dan mutu.

BPOM melakukan penyebaran informasi melalui berbagai saluran komunikasi termasuk dengan memanfaatkan pers/media. BPOM telah menerbitkan 19 Siaran Pers, dan 11 penjelasan/klarifikasi berita terkait hoax yang dipublikasikan juga melalui *website* dan media sosial BPOM. Selain itu dilaksanakan juga 16 kali *talkshow* atas permintaan media televisi, 35 kali wawancara Pimpinan BPOM dengan media dan menayangkan 9 *advertorial* di Media *Online* dan Media Cetak.

BPOM juga melakukan penyebaran informasi melalui media sosial melalui akun *official Facebook Fanpage, Twitter, Instagram* dan *YouTube*. Hasilnya performa media sosial BPOM mampu menggerakkan jumlah *followers* secara positif.

Tercatat sebanyak 7.891 pemberitaan tentang obat dan makanan secara umum maupun BPOM secara khusus. Dari 7.891 pemberitaan tersebut, sebanyak 3.137 bertendensi positif, 5.160 bertendensi netral dan 28 bertendensi negatif. Artinya masyarakat cukup mendapatkan informasi yang benar terkait obat dan makanan.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2018 terdapat 4 isu yang ramai diberitakan oleh media. Pertama *viostin* dan *enzyplex* dengan jumlah 769 berita, kedua *albothyl* dengan jumlah 380 berita, ketiga air minum mengandung mikroplastik dengan jumlah 203 dan keempat ikan mackerel mengandung cacing dengan jumlah 1.144 berita.

Selama April hingga Juni, media sosial diramaikan oleh topik mackarel bercacing dan susu kental manis. Ini diikuti beberapa kasus lainnya yaitu obat batuk, permen mengandung narkoba dan miras oplosan.

1. ***Facebook Fanpage official*** s.d Triwulan II tahun 2018 telah mencapai **71.736 *likes*** dan **74.551 *followers*** dengan *fanpage post engagement* tertinggi April pada materi Pangan Olahan Pada Diet Khusus, bulan Mei pada materi Larangan Beriklan OT dan bulan Juni pada materi Pengumuman Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi.

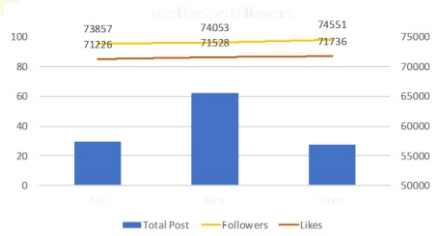

2. Pada tanggal 27 Mei 2018 BPOM memiliki akun *Facebook Fanpage official* baru yaitu **@bpom.official** setelah sebelumnya menggunakan akun @BpomRi yang akhirnya diterminate karena kendala teknis. Pada awal kemunculannya, akun ini baru mencapai 235 *likes* dan 1.211 *engagement users*.

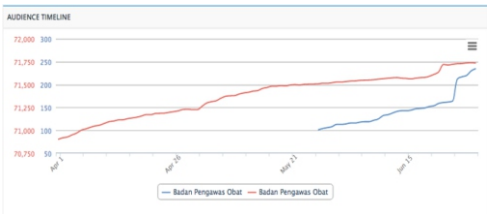

3. Total ***tweets* akun *Twitter* BPOM** s.d Triwulan II tahun 2018 sebanyak **212 *tweet*** dan mencapai *followers* sebanyak 22K sepanjang Triwulan II Tahun 2018. Beberapa materi yang menonjol diantaranya; Isu *Parasetamol* Mengandung Virus adalah *tweet* yang paling banyak di *retweet*, materi Jenis Susu Kental adalah *tweet* yang paling sering di *reply* dan materi Jenis Kemasan Plastik adalah materi yang paling disukai (Favorit).

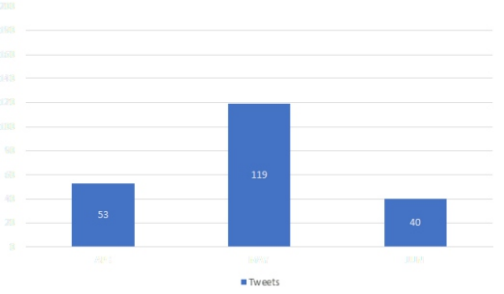

4. Total *followers* ***Instagram*** juga terus meningkat s.d Triwulan II tahun 2018 mencapai **35.741 *followers*** dengan memposting 44 foto, 2 *video* dan 25 carousels. Tema–tema yang menonjol diantaranya posting Kepala BPOM meninjau UMKM jamu binaan, materi Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Peringatan Pada Label Susu Kental Manis, Jenis Susu Kental Manis, Larangan Beriklan Obat Tradisional, BPOM mengecam aksi terorisme, Akibat Buruk Merokok dan masih banyak yang lainnya.

Dalam rangka mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan, telah dibentuk Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang merupakan media komunikasi dua arah antara BPOM dan masyarakat. ULPK merupakan saluran penyampaian saran, pertanyaan, informasi, dan pengaduan masyarakat kepada BPOM.

Data **layanan informasi dan pegaduan** masyarakat melalui ULPK Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia serta melalui *Contact Center* HaloBPOM1500533 sebanyak **16.914 layanan** (16.405 layanan informasi dan 509 layanan pengaduan).

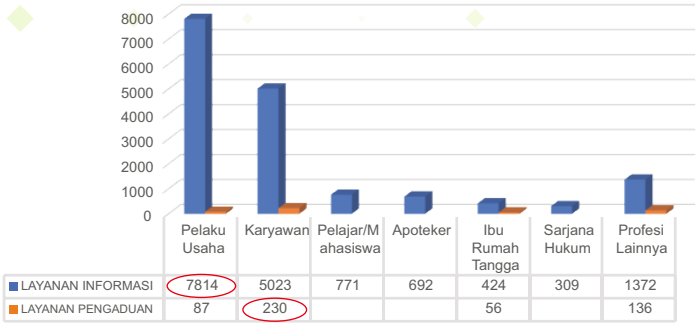

	Pelaku Usaha	Karyawan	Pelajar/Mahasiswa	Apoteker	Ibu Rumah Tangga	Sarjana Hukum	Profesi Lainnya
LAYANAN INFORMASI	7814	5023	771	692	424	309	1372
LAYANAN PENGADUAN	87	230			56		136

a **Profil profesi** masyarakat yang mengakses **layanan informasi** sebagian besar berasal dari **Pelaku Usaha** sebanyak **7.814 (47,63%) layanan**. Adapun **layanan pengaduan** sebagian besar dari **karyawan** sebanyak **230 (45,19%) pengaduan**.

b **Media komunikasi** yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses **layanan informasi** yaitu melalui **telepon** sebanyak **7.711 (47,01%) layanan** dan **penyampaian pengaduan** yaitu **datang langsung** sebanyak **157 (30,84%) layanan**.

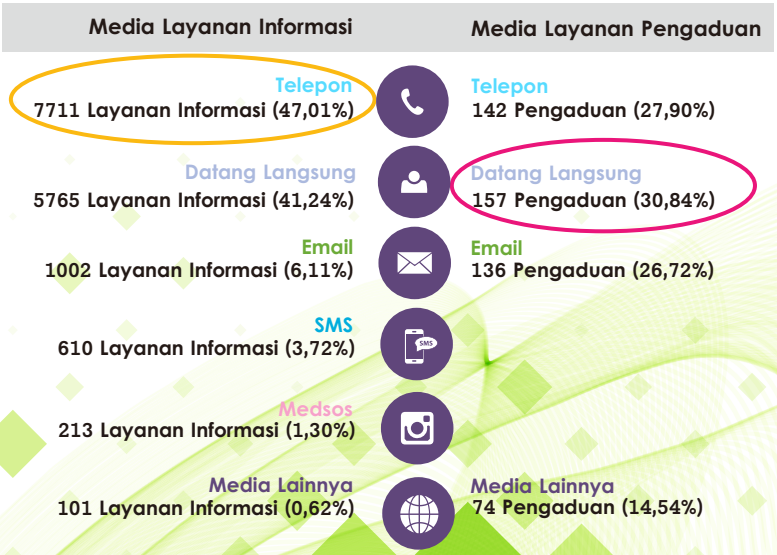

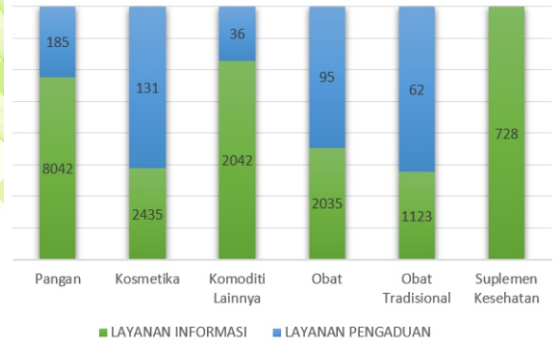

c **Komoditi** yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait **pangan** sebanyak **8.042 (49,01%) layanan informasi** dan **185 (36,35%) layanan pengaduan**.

d **Topik informasi** yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu informasi terkait **proses pendaftaran** sebanyak **6.704 (40,86%) layanan**. Adapun **topik pengaduan yang paling banyak** yaitu pengaduan tentang **inspeksi** sebanyak **244 (47,94%) layanan**.

* Pengaduan terkait produk / sarana yang ilegal dan / atau **TMS** yang perlu tindak lanjut di lapangan

Tahun 2018 BPOM telah melakukan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) melalui media juga melakukan KIE secara langsung ke masyarakat, seperti BPOM *'Goes To Campus'*, *Car Free Day* (CFD), Pameran, kegiatan koordinasi lintas sektor dan lain sebagainya.

V Penayangan Data dan Informasi Strategis Pada BPOM Command Center

Updating **SIPT Sesuai Prioritas Sampling 2018**

Dashboard Command Center **menayangkan 13 jenis data atau informasi**

Implementasi SKI *Border* dan SKI *post border* pada aplikasi e-bpom

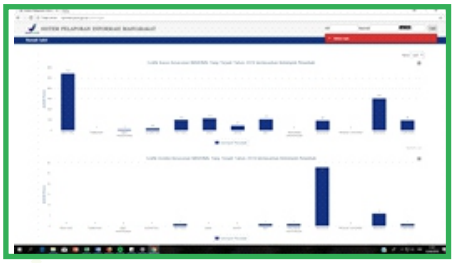

Aplikasi SPIMKer-KLB KP(Pemetaan kasus keracunan Obat dan Makanan berbasis risiko) dapat diakses dari *smartphone*

Sertifikat Elektronik Izin Edar Pangan Olahan

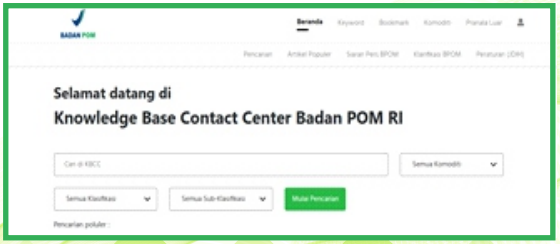

Aplikasi *Knowledge Based Contact Center*

VI Perkuatan Peraturan Perundang-undangan Pengawasan Obat dan Makanan

Bersama dengan stakeholder lintas sektor antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum dan HAM, BPOM ikut serta dalam pembahasan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah. BPOM juga terlibat aktif dalam pembahasanRancangan Permenkes Tahun 2018. Secara internal, sampai dengan triwulan II tahun 2018, BPOM telah menyelesaikan 12 Rancangan Peraturan Kepala Badan POM, Rancangan 173 Keputusan Kepala BPOM dan 5 Rancangan MoU. Selain itu, BPOM telah melaksanakan kegiatan penyebaran informasi dan penyuluhan hukum mengenai peraturan Obat dan Makanan, advokasi hukum terhadap stakeholder (pengacara dan LSM) serta penyelesaian permasalahan hukum terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan.

6 Judul RUU

1. RUU tentang Perlindungan Konsumen
2. RUU tentang Minuman Beralkohol
3. RUU tentang Ketenaganukiran
4. RUU tentang Narkotika
5. RUU tentang Pertembakauan
6. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

9 Judul RPP

1. RPP tentang Pendaftaran Merek Internasional
2. RPP tentang Pelaksanaan urusan dan pemerintah konkuren
3. RPP tentang Jamininan Produk Halal
4. RPP tentang Revisi PP 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
5. RPP tentang KeamananPangan
6. RPP tentang Label dan Iklan Pangan
7. RPP tentang Jenisdan Tarif PNBP yang berlaku pada BPOM
8. RPP tentang Sistem Informasi Perdagangan
9. RPP tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

6 Judul Rancangan PERMEN

1. Permenkes tentang perubahan Penggolongan Obat
2. Permenkes tentang perubahan penggolongan Psikotropika
3. Permenkes tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Produk Tembakau
4. Permenkes tentang Perubahan atas PP No 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau
5. Permenko tentang Peraturan Lembaga Standar Perizinan Berusaha
6. Permenko tentang Implementasi Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan melalui Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Terintegritas Bersama Kemenko PMK

VII Layanan Bantuan Hukum (Legal Management)

Maraknya tuntutan hukum terhadap aparat pemerintah tentu saja harus diantisipasi dengan penguatan peran pada bagian legal/hukum di setiap instansi pemerintahan. Satuan kerja yang membidangi urusan hukum ini dituntut untuk meningkatkan peran dan kemampuannya dalam menangani kritik dan koreksi masyarakat melalui pemberian bantuan hukum berupa pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan hukum kepada saksi/ahli, dan pelaksanaan penyuluhan hukum.

Sampai dengan **Triwulan II Tahun 2018**

jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan sejumlah 129 layanan

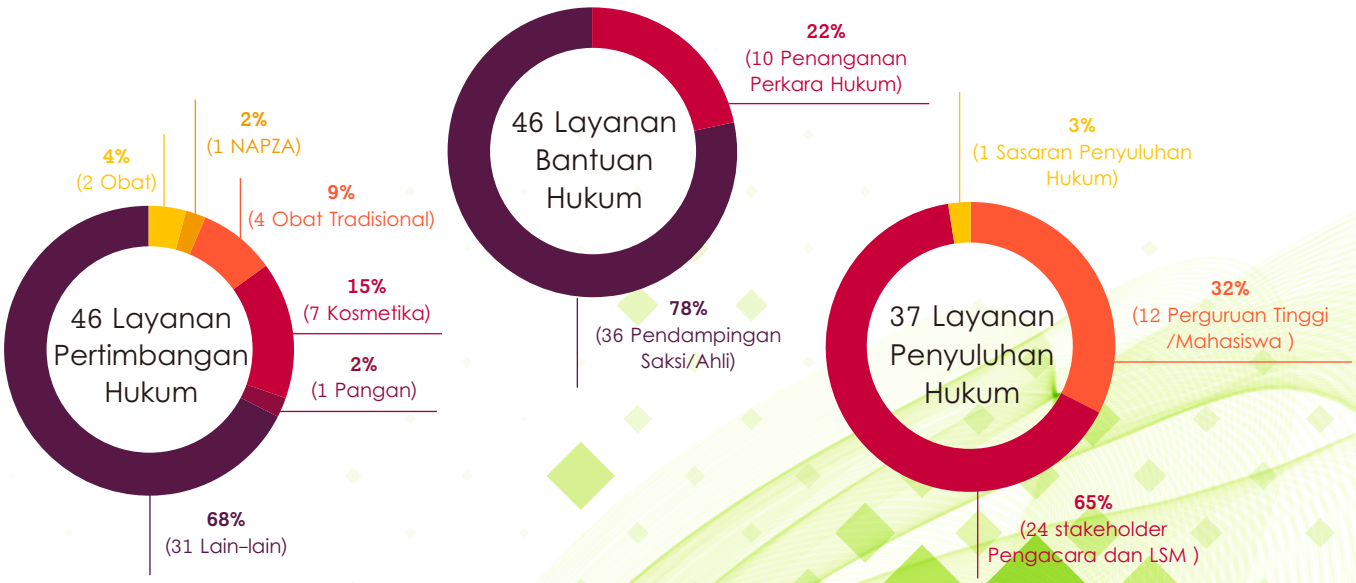

VIII Kerjasama Internasional

Kerjasama luar negeri BPOM tidak hanya ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsinya dalam pengawasan obat dan makanan, namun juga untuk mendukung Agenda Nawa Cita ke–6 dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Sampai dengan triwulan II tahun 2018, BPOM telah melakukan 4 kerjasama Bilateral.

a. 5 – 8 Maret 2018 : kunjungan kerja ke India yang bertujuan untuk melakukan ***benchmarking*** bagi pengembangan obat tradisional di Indonesia dengan mengikutsertakan pelaku usaha industri farmasi dan obat tradisional Indonesia untuk melakukan secara langsung pertemuan ***Business to Business*** dengan kalangan industri terkait di India guna mendukung kerja sama dagang yang menguntungkan kedua negara.

b. 11 – 14 Maret 2018 : Kepala BPOM selaku wakil Ketua Delegasi RI (Delri) menghadiri Pertemuan Sesi ke–61 ***Commission on Narcotics Drugs*** (CND) untuk mengikuti sesi Debat Umum (***General Debate***) dan ***National statement*** Indonesia. Di sela–sela pertemuan CND tersebut, BPOM juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan ***Executive Director*** UNODC, Mr. Yury Fedotov, yang sepakat untuk memperkuat dan kerja sama kedua lembaga melalui pembentukan suatu nota kesepahaman, khususnya dalam kerangka mendukung implementasi Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat yang diluncurkan oleh Bapak Presiden pada bulan Oktober 2017.

c. 17 – 25 April 2018 : Delegasi Komisi IX DPR RI bersama BPOM mengadakan pertemuan antara lain dengan Departemen Kesehatan dan Lembaga Pengawas Obat dan Makanan di Amerika, ***United Nation Development Programme*** (UNDP) dan ***United Nation Under Secretary General for Department of Economics and Social Affairs*** (USG DESA), ***Massachusets Institute of Technology*** (MIT), ***Harvard Kennedy School*** (HKS). Pada kunjungan kali ini Kepala BPOM juga menjadi panelis bersama para pejabat tinggi ***World Bank***, ***United States Food and Drug Administration*** (USFDA), Badan Pengawas Obat Chile dan sektor swasta (***Waters Corporation, Global Food Safety Initiative*** dan PRAN–RFL ***Group***) dimana tujuan pertemuan ini adalah memperkuat dukungan lembaga keuangan nasional dan internasional serta swasta untuk meningkatkan keamanan pangan melalui kebijakan dan inovasi yang tepat dan pada kesempatan ini BPOM menyampaikan pengalaman dalam menjawab tantangan keamanan pangan melalui pengawasan ***pre – market*** dan ***post - market***.

d. 15 – 18 April 2018 : Kunjungan Kerja ke Jerman bertujuan untuk mendapatkan masukan dan pengetahuan secara langsung terkait peningkatan pengawasan obat dan makanan dalam rangka perumusan rancangan Undang – Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan dengan cara mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai sistem pengawasan obat dan makanan di Jerman serta regulasi yang ada terkait pengawasan obat dan makanan. Pada kunjungan kerja ke Jerman, instansi yang telah dikunjungi adalah ***Hamburg School and Food Science*** (HFS) – ***the University of Hamburg*** di Hamburg, ***Federal Office of Consumer Protection and Food Safety*** (Kantor Federal Perlindungan Konsumen dan Keamanan Makanan) di Berlin, ***Federal Institute for Medicine and Medical Devices*** (Institut Nasional untuk Obat – obatan dan Alat Kedokteran) di Bonn.

IX Pengelolaan Anggaran

Pada tahun 2018, BPOM mendapat anggaran sebesar Rp2.173.728.393.000,– untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran tersebut terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 9 Satker Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2018 sebesar Rp477.968.872.287,– (21,99%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk 9 Satker Pusat Rp168.959.434.339,– dan realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp309.009.437.948,–

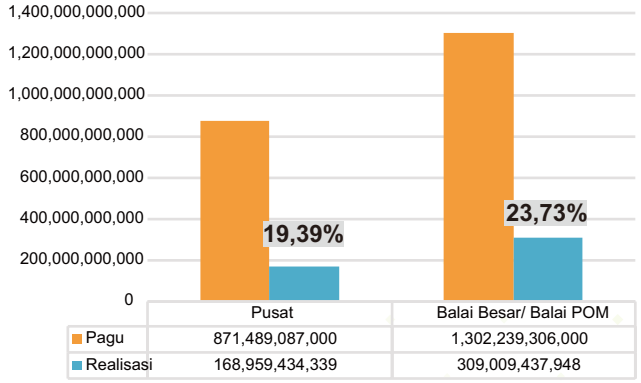

	Pusat	Balai Besar/ Balai POM
Pagu	871,489,087,000	1,302,239,306,000
Realisasi	168,959,434,339	309,009,437,948

Gambar 10. Proporsi Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan POM Pusat dan Balai s.d. Triwulan II Tahun 2018

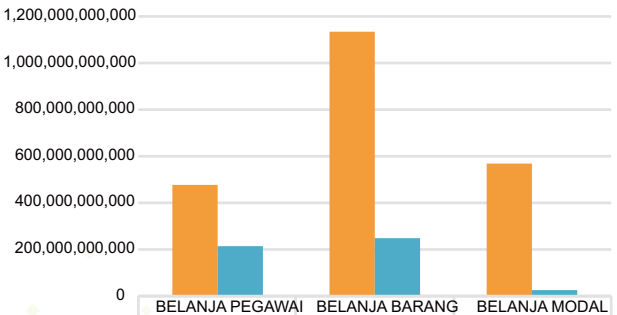

	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL
Pagu	472,804,332,000	1,133,659,155,000	567,264,906,000
Realisasi	209,140,290,208	246,668,157,051	22,160,425,028

Gambar 11. Proporsi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja s.d. Triwulan II Tahun 2018

X

Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2017. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifkasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per triwulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan II tahun 2018 sebagaimana terlampir pada buku ini.

PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2015–2019 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat serta meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta *continuous improvement*.

LAMPIRAN

CAPAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
s.d. TRIWULAN II TAHUN 2018

No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)		Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
I.	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM**	**Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM**	**378.332.217.000**	**101.429.281.306 (26,81%)**	**78**	**-**	**-**
		Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK			**WTP**	**WTP**	**100**
		Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN			**78**	**-**	**-**
1.1	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	Jumlah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan aman	**25.743.700.000**	**3.220.685.965 (12,51%)**	**126**	73	57,94
		Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti			**17.500**	8.793	50,25
		Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan			**250**	129	51,60
		Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun			**200**	190	95,00
1.2	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Badan POM	Jumlah pengembangan kerjasama dan/atau kerjasama internasional di bidang Obat dan Makanan	**7.225.900.000**	**1.478.726.702 (20,46%)**	**34**	10	29,41
1.3	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan	**41.149.800.000**	**8.469.920.460 (20,58%)**	**15**	12	80
		Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi			**1**	0	0
1.4	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	Persentase SDM BPOM memenuhi Standar Kompetensi	**204.322.699.000**	**75.248.464.842 (36,83%)**	**72**	0	0
		Persentase SDM BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria minimal Baik			**84**	80	80
		Persentase kualitas administrasi pimpinan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai aturan			**91**	0	0
		Persentase kualitas pengaturan acara dan kegiatan pimpinan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai aturan			**91**	0	0
		Persentase pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya secara tepat waktu			**100**	100	100
		Persentase layanan kepegawaian yang dselesaikan tepat waktu			**88**	80,96	101,20

No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)		Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.5	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan	Jumlah laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	18.716.697.000	5.475.770.918 (29,26%)	39	19	48,72
		Persentase laporan keuangan BPOM yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintah dan bebas dari kesalahan material			100	100	100
		Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP Unit Kerja			76	0	0
		Persentase hasil monitoring pencapaian Road Map RB			75	89,55	119,40
		Indeks kepuasan masyarakat			76	0	0
		Level Maturasi SPIP			3	3	100
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti BPOM			86	73,9	85,93
		Level kapabilitas APP (IACM)			3	3	100
1.6	Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi	Jumlah informasi obat dan makanan yang up to date sesuai lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan	81.173.421.000	7.535.712.419 (9,28%)	730	0	0
		Persentase infrastruktur TIK yang dikembangkan untuk optimalisasi E-Government bisnis proses BPOM			90	15,38	17,09
II.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM**	**Persentase satker yang mampu menelola BMN dengan baik**	**115.121.000.000**	**8.096.609.988 (7,03%)**	**100**	**95**	**95**
2.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	Jumlah dukungan teknis pengadaan barang dan jasa	2.541.000.000	576.206.693 (22,68%)	5	3	60
2.2	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai standar	112.580.000.000	7.520.403.295 (6,68%)	88	88	100
		Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik			100	100	95

No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)		Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
III.	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	**Persentase obat yang memenuhi syarat**	**1.661.708.186.000**	**368.442.980.993 (22,17%)**	**93,50**	**96,69**	**103,41**
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat			**83**	**93,06**	**112,12**
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat			**92**	**97,63**	**106,12**
		Persentase Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat			**82**	**95,44**	**116,39**
		Persentase makanan yang memenuhi syarat			**89,60**	**87,66**	**97,83**
		Jumlah industri farmasi yang meningkat kemandiriannya			**13**	**4**	**30,77**
		Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB			**95**	**96**	**101,05**
		Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan			**230**	**223**	**96,96**
		Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan			**9**	**8,92**	**99,10**
		Jumlah kerjasama yang diimplementasikan			**17**	**10**	**58,82**
3.1	Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	**1.302.239.306.000**	**309.009.437.948 (23,73%)**	**84.105**	33.425	39,74
		Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan			**63**	5,71	9,07
		Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan			**25**	15,18	60,73
		Jumlah perkara di bidang obat dan makanan			**318**	147	46,23
		Jumlah layanan publik BB/BPOM			**43.316**	28.319	65.35
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan			**840**	557	66,31
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu			**297**	166	55,89
		Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar			**93**	58,86	63,29

No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)		Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.2	Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemem Kesehatan	Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional yang memiliki sertfikat CPOTB	**29.931.900.000**	**4.340.269.141 (14,50%)**	**95**	96	101,05
		Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan			**230**	223	96,96
		Jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diaw asi			**46.550**	13.983	30,04
		Jumlah sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diinspeksi dalam rangka tindak lanjut pengaw asan			**340**	93	27,35
		Jumlah obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tidak memenuhi syarat yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengaw asan			**790**	117	14,81
		Persentase permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan yang mendapatkan keputusan tepat w aktu			**85**	78,81	92,71
3.3	Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	Persentase penyelesaian tindak lanjut pengaw asan keamanan dan mutu produk pangan termasuk label dan iklan	**16.949.100.000**	**3.052.661.089 (18,01%)**	**92**	98,63	107,20
		Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu			**650**	135	20,77
		Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan			**78**	100	128,21
		Persentase industri pangan olahan yang menerapkan program manajemen risiko			**9**	8,92	99,10
3.4	Pengembangan Obat Asli Indonesia	Jumlah pedoman/publikasi informasi keamanan, manfaat dan mutu bahan baku/formula dan peluang pasar obat asli indonesia	**4.383.000.000**	**158.468.000 (3,62%)**	**6**	0	0
		Jumlah UMKM obat tradisional yang diintervensi			**40**	0	0

No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)		Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.5	Pengawasan Distribusi Obat	Persentase peningkatan pedagang besar farmasi yang memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik	**18.566.990.000**	**2.079.838.159 (11,20%)**	**85**	50	58,82
		Jumlah PBF yagn diberikan bimbingan teknis/sosialisasi terkait CDOB			**325**	331	101,85
		Persentase pemenuhan time line tindak lanjut hasil pengawasan pedagang besar farmasi			**87**	60	68,97
		Persentase iklan dan penandaan obat beredar yang memenuhi ketentuan			**100**	99,23	99,23
		Jumlah tindak lanjut regulatory terkait keamanan obat pasca keamanan (farmakovigiance)			**16**	1	6,25
		Jumlah kajian farmakovigilans obat beredar			**16**	1	6,25
		Jumlah laporan ESO dari tenaga kesehatan/fasilitas pelayanan kesehatan dan industri farmasi yang ditindaklanjuti			**800**	197	24.63
		Persentase kasus obat ilegal termasuk palsu yang ditindaklanjuti			**100**	94,12	94,12
3.6	Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Jumlah label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan	**10.769.100.000**	**2.139.346.059 (19,87%)**	**64.000**	20.434	31,93
		Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor (NPP) farmasi yang tidak memenuhi ketentuan			**78**	0	0
		Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu			**83**	98,08	118,17
3.7	Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	**13.593.000.000**	**1.326.714.005 (9,76%)**	**170**	162	95,29
		Persentase Kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan			**90**	0	0
		Persentase sarana bahan berbahaya yang diperiksa			**56**	2,4	4,20

No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)		Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.8	Pengawasan Produksi Obat	Persentase hasil inspeksi dengan temuan kritikal yang ditindaklanjuti tepat waktu	**13.547.000.000**	**2.049.540.589 (15,13%)**	**85**	25	29,41
		Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya			**13**	4	30,77
3.9	Penilaian Pangan Olahan	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	**9.009.000.000**	**2.666.614.974 (29,60%)**	**88**	49,06	55,76
3.10	Penilaian Obat	Persentase keputusan penilaian obat yang diterbitkan tepat waktu	**9.009.000.000**	**2.997.702.025 (33,27%)**	**78**	62,39	79,99
3.11	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase keputusan registrasi obat tradisional yang diterbitkan tepat waktu	**13.096.000.000**	**2.604.670.396 (19,89%)**	**70**	78,40	112
		Persentase keputusan registrasi suplemen kesehatan yang diterbitkan tepat waktuPersentase keputusan registrasi suplemen kesehatan yang diterbitkan tepat waktu			**60**	63,8	106,27
		Persentase keputusan registrasi kosmetika yang diterbitkan tepat waktu			**82**	85,2	103,86
3.12	Penyusunan Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Jumlah standar obat tradisonal, kosmetik dan suplemen kesehatan yang disusun	**4.336.000.000**	**933.906.691 (21,54%)**	**40**	21	52,50
		Jumlah keputusan dokumen uji obat klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tepat waktu			**6**	0	0
3.13	Penyusunan Standar Pangan	Jumlah standar pangan yang Disusun	**8.176.900.000**	**2.384.390.589 (29,16%)**	**14**	Progres 50,44%	50,44
3.14	Penyusunan Standar Obat	Jumlah standar obat yang disusun	**6.036.000.000**	**969.211.492 (16,06%)**	**10**	Progres 42,54%	42,54
		Jumlah rekomendasi Laporan Uji Bioekivalensi yang selesai dievaluasi			**80**	19	23,75
3.15	Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan	Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan	**45.018.000.000**	**5.904.688.212 (13,12%)**	**100**	Progres 19,32%	19,32
		Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan			**5**	Progres 21,23%	21,23
		Jumlah kabupaten/kota yang sudah nenerapkan peraturan Kepala BPOM tentang IRTP			**20**	Progres 15,28%	15,28

No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)		Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.16	Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM yang sesuai persyaratan Good Laboratory Practices	**115.884.780.000**	**16.685.244.692 (14,40%)**	**80**	21,34	26,68
		Persentase sampel uji yang ditindaklanjuti tepat waktu			**85**	79,84	93,93
3.17	Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan Makanan	Jumlah intervensi yang diberikan kepada BB/BPOM dalam pelaksanaan investigasi awal dan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	**41.259.376.000**	**5.638.330.323 (13,67%)**	**78**	20	25,64
		Perkara yang diselesaikan hingga penyerahan berkas perkara (tahap 1)			**5**	0	0
		Perkara yang diselesaikan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2)			**3**	0	0
3.18	Riset Keamanan, Khasiat, dan Mutu Obat dan Makanan	Jumlah riset laboratoium dan kajsian yang dimanfaatkan	**18.470.724.000**	**3.635.837.509 (19,68%)**	**72**	Progres 39,90%	39,90

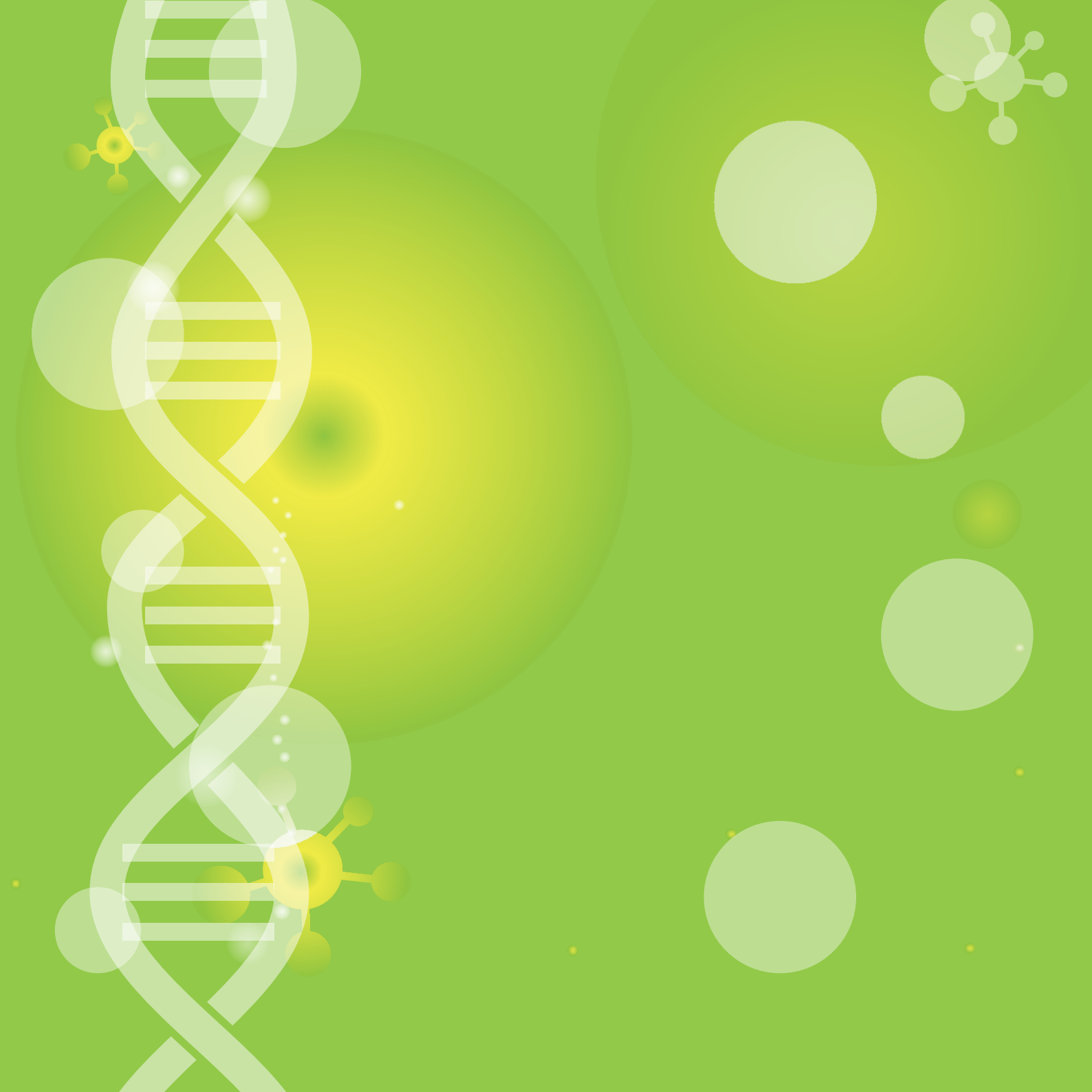

BADAN POM RI

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN II TAHUN 2018

1500533
HALOBPOM

Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560

021 4244691

halobpom@pom.go.id

www.pom.go.id

@bpom_ri

Bpom RI

BADAN POM RI

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN II TAHUN 2018